

Didakwa Pembunuhan Berencana, Ferdy Sambo akan Ajukan Eksepsi

JAKARTA (IM) - Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo berencana akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dilakukan oleh JPU. Eksepsi direncanakan akan diajukan Ferdy melalui kuasa hukumnya.

"Iya nanti kita akan ajukan eksepsi," kata kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/10).

Eksepsi, kata Arman, didasarkan atas dakwaan JPU. Ia pun memberikan sejumlah catatan terhadap dakwaan JPU kepada kliennya. Salah satunya, konstruksi dakwaan dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. "Dalam tataran teoritis, dakwaan seperti ini harusnya dapat dinyatakan batal sesuai Pasal 143 ayat 3 KUHP," tutur Arman.

Arman berkata, terdapat bagian yang dihilangkan dalam konstruksi perkara saat di tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci bagian yang dihilangkan tersebut.

"Hilangnya fakta-fakta ini berpotensi hilangnya rasa keadilan bagi seluruh terdakwa yang saat ini berproses secara hukum," terang Arman.

"Kami juga menyoroti tuduhan serius kepada FS yang hanya didukung oleh satu keterangan saksi. Jadi satu keterangan saksi saja, jadi yang kita lihat hanya keterangan saksi Bharada E," tandas Arman.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo sebelumnya didakwa telah melakukan pembunuhan berencana oleh JPU. Ferdy Sambo disebut melakukan kerja sama melakukan pembunuhan berencana bersama dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu (Bharada E), Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kwat Maruf.

"Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui siaran virtual, Senin (17/10). ● han

Kementerian PPPA Ungkap 43 Anak Meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA (IM) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ungkap ada 43 anak yang meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rinciannya, 33 anak laki-laki dan 10 anak perempuan.

"Dari 132 korban meninggal, sebanyak 43 korban di antaranya masih berusia anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar.

Nahar menjelaskan bahwa Kementerian PPPA telah memberikan layanan dukungan psikologis kepada 119 korban, yang 51 di antaranya merupakan anak-anak.

Untuk itu, layanan dukungan psikososial dilaksanakan oleh tim gabungan Kabupaten Malang yang terdiri atas Tim UPTD PPA Dinas PPPA Kabupaten Malang, Dinkes Kabupaten Malang, Polres Malang,

dan HIMPSI.

Saat ini, tim Fakultas Psikologi dari Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Malang, Universitas Merdeka Malang, Yayasan Save The Children, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), serta organisasi kemanusiaan lainnya.

Di Tragedi Kanjuruhan, Polri telah menetapkan enam tersangka, yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) AHL, Ketua Panitia Pelaksana AH, Security Officer SS, Kabagops Polres Malang WSS, Dandi 3 Brimob Polda Jawa Timur H, dan Kasat Samapta Polres Malang BSA.

Tersangka disangkakan dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 103 Juncto Pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



UJI PUBLIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

Komisiner KPU Mochamad Afifuddin (kanan) dan Kepala Biro Perundang-undangan KPU Nur Syarifah (kiri) mengikuti uji publik peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di kantor KPU, Jakarta, Senin (17/10). Uji publik yang digelar secara hibrid itu diikuti perwakilan Kementerian, kepolisian, parpol dan LSM.

Buntut Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Mahfud MD Dorong PSSI Segera Gelar KLB

Pemerintah tak akan memberi izin pertandingan liga sepak bola profesional yang meliputi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai PSSI dinilai siap jalankan kompetensi.

JAKARTA (IM) - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (IGIPF) Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, meminta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," ujar Ketua IGIPF Mahfud MD, dikutip dari kesimpulan dan rekomendasi hasil investigasi TGIPF, Jumat (14/10).

Selain itu, TGIPF juga meminta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan

yang menewaskan ratusan supporter, Sabtu (1/10).

"Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," ujar Ketua IGIPF Mahfud MD, dikutip dari kesimpulan dan rekomendasi hasil investigasi TGIPF, Jumat (14/10).

Selain itu, TGIPF juga meminta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan

Bule beserta seluruh jajaran Komite Eksekutif PSSI mengundurkan diri dari jabatannya.

Dorongan agar Iwan Bule dan kawan-kawan mengundurkan diri dari PSSI sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang. Rinciannya, dari 712 korban tersebut, sebanyak 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang maupun ringan.

Mahfud menegaskan, Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yang meliputi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Pemerintah tak akan memberikan izin kompetisi tersebut sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi.

"Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga

2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertarikan umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan," terang Mahfud.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik, TGIPF mendorong perlunya PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.

Penyelamatan PSSI, menurut Mahfud, tidak cukup hanya berpedoman pada regulasi

PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Regulasi PSSI perlu pula didasarkan pada prinsip penyelamatan kepentingan publik maupun keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*). "Dasar dari ketataan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya," tegas Mahfud.

Adapun temuan TGIPF terkait investigasi tragedi Kanjuruhan sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Senin (17/10). ● han

Tito Apresiasi Anies dan Riza Selama Pimpin DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria yang telah memimpin DKI Jakarta beberapa tahun belakangan ini. Tito mengakui bahwa menjadi Gubernur tidak mudah karena permasalahan di DKI Jakarta sangat kompleks. Hal tersebut bisa dirinya rasakan saat menjadi Kapolda Metro Jaya.

"Saya kira saya pernah lama dinas di Jakarta termasuk di Kapolda Metro Jaya tidak ringan permasalahan di Jakarta, sangat sangat-sangat kompleks sekali tapi bapak alhamdulillah bisa menyelesaikannya," kata Tito dalam sambutan di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (17/10).

Tito yang mewakili pemerintah pusat mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang telah dilakukan oleh Anies dan Riza selama memimpin DKI Jakarta. "Saya selaku mewakili pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak-bapak berdua. Dan insya allah semua akan dapat jalani dan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT," kata Tito.

Pelantikan Heru sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta merupakan amanat undang-undang

untuk mengisi kekosongan jabatan selama 1 tahun. Sebab pada 2024 akan dilaksanakan pilkada serentak termasuk pemilu lainnya.

"Pelantikan ini karena berakhirnya masa jabatan pejabat-pejabatnya yang definitif yang lama baik di DKI Jakarta maupun Yapen dan Tolikara sebagai konsekuensinya sesuai undang-undang karena memang nanti pilkada dilaksanakan tahun 2024 maka kekosongan itu diisi oleh pejabat," kata Tito.

Heru yang dilantik pada Senin (17/10), kata Tito, sudah diseleksi dan disidangkan yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. "Penjabat ini sudah melalui seleksi dan khusus utk DKI Jakarta adalah 3 nama yang diajukan oleh DPRD yang di-TPA-kan sidang dipimpin oleh bapak Presiden serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga yang kemudian memutuskan memilih bapak Heru sebagai penjabat," jelasnya. ● han

Dokter Pribadi Bersama Kuasa Hukum Lukas Enembe Kembali Datangi KPK

JAKARTA (IM) - Tim kuasa hukum bersama dokter pribadi Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Kedatangan tim kuasa hukum dan dokter pribadi itu untuk menjelaskan kondisi kesehatan Lukas Enembe pasca diperiksa oleh dokter dari Singapura. Untuk diketahui, Lukas sempat diperiksa oleh dokter ahli spesialis dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, beberapa waktu lalu.

Namun, Roy Rening, salah satu tim kuasa hukum Lukas Enembe, mengatakan, hasil pemeriksaan medis kliennya belum dikirim oleh dokter dari Singapura. Mereka masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter Singapura tersebut.

"Masih tunggu hasil dari Singapura," kata Roy di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Roy menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe oleh dokter Singapura. Ia berharap KPK bisa berkoordinasi dengan tim dokter pribadi Lukas Enembe terkait rencana kedatangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat.

"Untuk persiapan kalau nanti ada visit dari tim independen dokter dari IDI bersama penyidik untuk memastikan kondisi Pak Lukas," kata Roy.

Tim kuasa hukum mempersilakan KPK serta tim independen dokter dari IDI untuk datang ke Papua dan melihat langsung kondisi kesehatan Lukas Enembe. Pihak Lukas Enembe menyambut baik rencana KPK tersebut.

Sebelumnya, Lukas menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi dari Singapura. Hasilnya, Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstremitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum memberikan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah digebegor berpindah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah berpindah ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang menendangi temuan PPATK tersebut. ● han



KOMNAS HAM PANGGIL PAGUYUBAN SUPORTER TIMNAS INDONESIA

Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro (kiri) didampingi Penasihat PSTI Fanny Riawan (kanan) memberikan keterangan usai memenuhi panggilan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/10). Komnas HAM masih menggali berbagai keterangan terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang dengan memanggil PTSI guna melihat perspektif pengelolaan sepakbola di mata supporter.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT USAHA GAS MAKMUR

Dengan ini, Direksi PT Usaha Gas Makmur, berkedudukan di Bogor ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 2 November 2022
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Jalan Raya Narogong KM 26.5, Desa/Kelurahan Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Agenda : 1. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
2. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Mohon kehadirannya tepat waktu.

Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 18 Oktober 2022
Direksi Perseroan
PT Usaha Gas Makmur

mandiri

PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat Debitur	Jumlah Tagihan per Tgl 18 Oktober 2022	Alamat Agunan
1.	Sugih Mula Jaya Abadi	Jl. Dian Mogot II No.2 RT.007 RW.005 Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	436.678.372,00	- Kpl. Kampung Kelor, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Jawa Barat - Kel. Kedauang, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang, Jawa Barat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 21 Oktober 2022, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Collection & Recovery Group
Regional Retail Collection & Recovery Region V
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 18 Oktober 2022
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Regional Retail Collection & Recovery Region V | Jakarta 3

PENGUMUMAN

Direksi PT Pelayaran Nasional Wibowo Bersaudara ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melakukan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan melalui mekanisme konversi utang menjadi ekuitas dalam Perseroan. Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan telah dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 17 Oktober 2022
PT Pelayaran Nasional Wibowo Bersaudara

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE

Bahwa perjanjian pembiayaan :

No.	Brand, Type, Color & Year	Tax	Transmission	Police Number
1	NISSAN GRAND LIVINA XV HITAM METALIK 2010	08/11/2022	A/T	D 1031 VCM
2	HONDA CIVIC FD1 1.8 HITAM METALIK 2009	18/07/2020	A/T	D 1422 OW
3	MAZDA Mazda 2 1.5L HB Sports 5 SILVER METALIK 2012	29/04/2019	M/T	B 1724 WKC
4	DATSUN GO+PANCA D 1.2 PUTHI 2015	20/08/2019	M/T	F 1052 LY
5	DAIHATSU F601RV- GMDFUJ XENIA HITAM METALIK 2007	24/07/2020	M/T	B 2963 BH
6	NISSAN MARCH 1.2 (4X2) ABU ABU TUA METALIK 2011	04/01/2023	A/T	F 1101 BL

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 24 Oktober 2022. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitungannya kembali.

Horat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670

PENGUMUMAN

Dengan ini kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2022, yang beridentitas :

Nama : BAYU PUTRANTO
No KTP : 3201272211880002
Alamat : Villa Bogor Indah 5 Cluster Pelikan Blok Ec, RT 004, RW 007, Pasir Jambu, Sukaraja Kabupaten Bogor,

Sudah tidak ada hubungan lagi dengan direksi dan karyawan dari perusahaan kami. Maka atas segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sudah tidak menjadi tanggung jawab kami, dan yang bersangkutan sudah TIDAK dapat mengatasnamakan perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

PT ALTAVINNO
Direksi

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN

Direksi PT. Fajar Surya Swadaya ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan melalui pengambilalihan saham secara langsung dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), yang mana rencana tersebut akan mengakibatkan berakhinya pengendalian atas Perseroan dan perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").

Keberatan atas Rencana Pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan pada alamat di bawah ini, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini yaitu tanggal 1 November 2022.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUPT dan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selasa, 18 Oktober 2022
Utuk dan atas nama Direksi
PT. Fajar Surya Swadaya
Jl. Alpda KS Tuban Raya No. 66C, RT 00/RW 001
Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta